

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah badan usaha yang didirikan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Demi mencapainya tujuan yang dimaksud bank melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Tugas dan fungsi bank secara umum yang pertama: bank bertugas menyalurkan kredit kepada lembaga usaha atau perseorangan yang membutuhkan (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004) . Tujuan penyaluran kredit ini untuk kegiatan yang bersifat produktif. Kredit terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kredit jangka panjang, kredit jangka menengah, dan kredit jangka pendek. Kedua: perbankan memiliki tugas untuk menarik uang dari masyarakat (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004). Artinya, masyarakat boleh menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito berjangka, giro, atau rekening koran, serta tabanas. Ketiga: menyalurkan jasa di bidang lalu lintas peredaran dan pembayaran uang (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004). Jasa-jasa ini termasuk jasa pengeluaran cek, menjual dan membeli wesel, penukaran valas, dan masih banyak lainnya. Keempat: bank bertugas memberikan jaminan-jaminan bank dan juga menyewakan tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga. (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).

Sementara itu, dua jenis peranan perbankan, yaitu peranan dalam negeri dan peranan luar negeri. Peranan dalam negeri artinya adalah bank mempunyai peranan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri seperti kegiatan administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan, dan pengiriman uang, sedang peranan perbankan untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004).

Perbankan dipilih karena alasan utama kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kepercayaan atau *trust*, baik sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demi adanya kepercayaan dibutuhkan informasi laporan keuangan yang disajikan secara benar dan jujur kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi.

Informasi yang disajikan harus memberikan manfaat bagi para penerima informasi yang menyajikan peristiwa nyata tentang data-data kondisi keuangan perusahaan, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan (Aryani, 2019). Laporan keuangan sendiri merupakan salah satu sumber informasi akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan (IAI, 2009:5). Ada juga pernyataan bahwa setiap entitas bisnis yang menjalankan aktivitas bisnis wajib untuk membuat laporan keuangan perusahaannya (IAI, 2019). Tujuan dari laporan keuangan tersebut untuk memberi informasi yang bermanfaat kepada pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan menjadi media dan sumber yang paling penting untuk menilai dan mengetahui kondisi ekonomi suatu perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan dituntut harus memiliki kualitas andal, relevan, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan sebagai penyajian yang tidak memihak dan jujur (Dwidinda, Khairunnisa, Triyanto, 2017). Oleh karena itu penyajian laporan keuangan yang tidak memihak dan jujur adalah laporan keuangan yang berintegritas.

Integritas laporan keuangan adalah salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur dalam menyediakan informasi atau laporan keuangan yang secara formal dan juga wajib untuk dipublikasikan secara benar sebagai alat pertanggungjawaban dari pihak manajemen kepada pengelolaan sumber daya pemilik (Dwidinda, Khairunnisa, Triyanto, 2017). Tetapi kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena yang sering terjadi dan membuktikan kurangnya integritas dalam suatu pelaporan keuangan didalam penyajian informasi yang diberikan kepada pengguna laporan keuangan.

Kasus terjadi pada PT Reliance *Securities* Indonesia Tbk (RELI) ini yang dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000.000 dan peringatan tertulis. Sanksi diberikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait integritas laporan keuangan RELI. RELI dinilai menyajikan laporan keuangan dan modal kerja yang bersih dan disesuaikan (MKBD) secara tidak akurat. Dan teliti lebih jauh kebelakang, RELI juga sempat terbawa kasus transaksi semu saham pada PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). RELI tersangkut kasus ini bersama sejumlah sekuritas lain. Otoritas Jasa Keuangan juga sempat memberikan sanksi penghentian aktivitas perdagangan kepada RELI dan dua sekuritas lain karena kasus ini. Dua sekuritas lain yakni Danareksa Sekuritas dan Millenium Danatama Sekuritas (Kontan, 2016).

Kasus juga diambil dari Ayem dan Yuliana (2019) yang terjadi pada Bank Bukopin. Terdapat manipulasi data kartu kredit yang kemudian lolos dari pengawasan dan audit selama beberapa tahun terakhir, baik audit internal Bank Bukopin maupun dari KAP auditor independen, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Ini disebabkan karena lemahnya kinerja pihak-pihak petinggi Bank Bukopin. Laporan keuangan ditangani oleh auditor Ernest dan Young (EY) yang merupakan salah satu anggota big four kantor akuntan dan konsultan terbesar di dunia. Hal ini membuat reputasi KAP menjadi tercoreng nama baiknya. Dalam hal ini kasus manipulasi bukan hanya pihak dalam perusahaan saja yang bertanggung jawan, tetapi juga ada pengaruh dari pihak luar perusahaan (Ayem dan Yuliana, 2019).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak laporan keuangan yang kurang berintegritas. Terjadi manipulasi akuntansi terhadap laporan keuangan karena informasi disajikan secara tidak jujur dengan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya.

Integritas laporan keuangan dapat dinilai atau diukur dengan menggunakan prinsip konservatisme. Konservatisme adalah praktik dimana perusahaan mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam merespon berita buruk, tetapi tidak meningkatkan laba dalam merespon berita baik (Jamaan, 2008; dalam Rachman, 2016). Konservatisme juga merupakan suatu prinsip dengan sikap penuh kehati-hatian didalam pelaksanaannya terhadap penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan untuk menghadapi dan meminimalkan resiko diberbagai kondisi ketidakpastian dalam bisnis.

Laporan keuangan yang berintegritas memerlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan harus diterapkan secara betul didalam perusahaan. Tata kelola adalah suatu kebijakan yang diterapkan perusahaan didalam mengontrol seluruh aktivitas internal perusahaan agar terjadi keseimbangan pemenuhan kepentingan bagi pemangku kepentingan perusahaan (Lerizki, Putri, Army, 2017). Penerapan tata kelola yang baik akan mencegah terjadinya manipulasi akuntansi oleh perusahaan atau manajemen karena adanya pengawasan.

Pengawasan yang pertama oleh kepemilikan institusional yang merupakan investor berpengalaman. Kepemilikan insitusional melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih efektif agar tidak mudah diperdaya begitu saja contohnya seperti manipulasi penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh tindakan manajer perusahaan (Yani dan Budiarta, 2014; dalam Melyawati, 2018). Kepemilikan institusional berasal dari pihak eksternal yang memiliki saham dengan persentase besar, sehingga mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan tingkat usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional (Dwidinda, Khairunnisa, Triyanto, 2017). Dengan ini kepemilikan institusional diharapkan dapat membantu dan mendukung manajemen agar lebih memperhatikan kinerja perusahaannya sehingga tidak terjadi kecurangan. Banyak penelitian yang sudah

dilakukan mengenai kepemilikan institusional, yang menghasilkan kesimpulan berbeda-beda. Menurut penelitian Badewin (2019), dan juga penelitian oleh Dwidinda, Khairunnisa, Triyanto (2017) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepemilikan insitusional terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2019) kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Pengawasan yang kedua oleh komisaris independen yang telah memenuhi syarat dan merupakan badan eksternal dari perusahaan. Komisaris independen terdiri dari dewan komisaris yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan juga untuk mengawasi kebijakan-kebijakan manajer internal, serta menjadi penasehat untuk manajemen (Sipahutar, 2017). Syarat yang harus dipenuhi sebagai dewan komisaris dalam suatu perusahaan menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep- 643/BL/2012, sebagai berikut: dalam waktu enam bulan terakhir tidak berstatus anggota yang bekerja dan memiliki wewenang untuk mengendalikan, ataupun mengawaasi perusahaan; di perusahaan tidak sebagai pemilik saham baik secara langsung ataupun tidak langsung; tidak terjalinya hubungan afiliasi dengan perusahaan, atau dengan anggota dewan komisaris, atau dengan anggota direksi, ataupun dengan pemegang saham utama perusahaan, dan secara langsung atau tidak langsung tidak ada hubungan yang berkaitan dengan perusahaan di kegiatan usaha perusahaan.

Komisaris independen juga berguna menyeimbangkan keputusan yang akan diambil oleh kepemilikan saham minoritas, dengan menjalankan fungsi monitoring agar integritas laporan keuangan mendapat hasil yang lebih baik (Widodo, 2016; dalam Ayem dan Yuliana, 2019). Banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas komisaris independen dan menghasilkan kesimpulan berbeda-beda. Menurut Savero (2017) komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan menurut Aryani (2019) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Pengawasan yang ketiga oleh komite audit diketuai oleh dewan komisaris yang juga memiliki kesamaan dengan komisaris independen yaitu meningkatkan lagi pengawasan terhadap manajer perusahaan dari tindakan yang memungkinkan terjadi kecurangan terhadap laporan keuangan perusahaan. Tandiontong (2016, dalam Badewin, 2019), menyatakan bahwa komite audit merupakan anggota yang terpilih dari dewan direksi dan profesional, yang bertanggungjawab dengan membantu auditor untuk tetap bersikap independen dari manajemen. Menurut Mulyadi (2002: 26) independensi merupakan sikap mental bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dapat dikendalikan oleh pihak lain, dan juga tidak bergantung pada orang lain. Independensi dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dalam diri seorang auditor untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif atau tidak memihak dalam menyatakan pendapat. Menurut Savero (2017) jika jumlah komite audit semakin banyak maka semakin besar juga tekanan yang diberikan kepada manajemen perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas. Dalam penelitian oleh Badewin (2019) dan Aryani (2019) komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwidinda, Khairunnisa, Triyanto, (2017) dan Sipahutar (2017) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Penelitian ini kembali meneliti pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit terhadap integritas laporan keuangan dengan sampel pada perusahaan perbankan. Industri perbankan adalah industri dengan memiliki interaksi tinggi antara konsumen dan produsen sehingga kualitasnya bergantung pada bank sebagai pemberi jasa dan pada nasabah sebagai penerima jasa (Anggrainy, 2015). Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan oleh industri perbankan harus berintegritas. Tahun penelitian menggunakan periode 2015 sampai 2018 karena belum ada peneliti sebelumnya yang menggunakan periode ini sehingga informasi pada periode ini dianggap terbaru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada para pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu tentang pengaruh integritas laporan keuangan terhadap suatu perusahaan, serta menambah ilmu tentang pengetahuan akuntansi.

Dan sebagai wawasan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas dan menambah referensi tentang integritas laporan keuangan agar memperoleh hasil yang bermanfaat dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang berintegritas sehingga berguna untuk pemenuhan kepentingan bagi pemangku kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan alasan/latar belakang sebagai dasar pemilihan judul, perumusan masalah, serta berisikan tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dilakukan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori - teori yang menjadi dasar dan mendukung penelitian, seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian atau rerangka konseptual yang digunakan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan penelitian, identifikasi, defenisi, serta pengukuran untuk variabel-variabel yang digunakan. Selai itu, bab ini juga berisikan jenis, sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan, kemudian populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta bagaimana cara melakukan analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum objek yang digunakan dalam penelitian, deskripsi dan hasil analisis data yang dilakukan, serta pembahasan atas hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan keterbatasan apa saja yang ditemukan dalam penelitian ini, dan sara untuk peneliti selanjutnya.